

MEMOTRET AGAMA BAHAI DI JAWA TENGAH DI TENGAH LEMAHNYA PERLINDUNGAN PEMDA

Oleh : Moh Rosyid

STAIN Kudus

Email: mrosyid72@yahoo.co.id

ABSTRACT

By hearing the name of the Baha'i religion, the public was shocked, why? The name was not familiar religion in public. This is a result of Presidential Decree 264/1962 on the Prohibition of 7 organizations, including Bahai, although Kepres Wahid repealed by Presidential Decree No.69 / 2000. Baha'i arrived in Indonesia around 1878, brought by people from Persia and Turkey, namely Jamal Mustafa Effendi and Rumi in Makassar. His arrival is part of an effort to expand its diaspora Baha'i into the world with 12 principles. However, post-Presidential Baha'is Gus Dur has not received full civil rights. This is a result of (1) an understanding of local government to the Presidential Edict No.1 / PNPS / 1965 Article 1 (1) that the state did not limit the number of religions. All religions have the right to live in Indonesia. Provided, however, does not conflict with the law, (2) the first point it was understood the charge due to the regulation, only by inherited from generation to generation on the basis of 'hear'. On the other hand, local government officials maintain that without deepening the understanding that the charge of law has no meaning. Secondly it as a marker that should concern scholars to enlighten the public, in particular on the state apparatus through the research that the government should serve, respect and fulfill the rights of religious people, whatever their religion, especially the vulnerable minority treated wisely by the government and the majority, These research data are obtained by interview, observation, and group discussion forum with the people of the Baha'i religion in Kidul Cebolek Village, District Margoyoso, Pati regency, Central Java, which was served civil rights, such as non compliance with the request issuance of a marriage certificate Baha'i citizens the mating Baha'i, the column of religion on identity cards by a dash (-), formal schools were not given the Baha'i religion lesson even have to move another religion (one of the religion of the majority), and funeral set apart with a public funeral.

Keyword : religious freedom, civil rights and government obligations

ABSTRAK

Mendengar nama agama Baha'i, publik terkejut, mengapa? Nama agama itu belum familier di hadapan publik. Hal ini akibat Kepres No.264/1962 tentang Larangan 7 Organisasi, di antaranya Bahai, meski Kepres dicabut Presiden Gus Dur dengan Kepres No.69/2000. Baha'i masuk ke Indonesia sekitar tahun 1878, dibawa oleh orang dari Persia dan Turki, yaitu Jamal Effendi dan Mustafa Rumi di Makassar. Kedatangannya bagian dari upaya diaspora untuk mengembangkan sayap Baha'i ke penjuru dunia dengan 12 asas. Akan tetapi, umat Baha'i pasca-Kepres Gus Dur belum mendapatkan hak sipilnya secara utuh. Hal ini akibat (1) pemahaman pmda terhadap Penpres No.1/PNPS/1965 Pasal 1 ayat (1) bahwa negara tak membatasi jumlah agama. Semua agama berhak hidup di Indonesia. Asalkan, tidak bertentangan dengan perundang-undangan, (2) poin pertama itu akibat tak dipahami muatan perundangannya, hanya berdasarkan mewarisi secara turun-temurun atas dasar 'mendengar'. Di sisi lain, pejabat pmda mempertahankan pemahaman itu tanpa upaya pendalaman sehingga muatan perundangan tak memiliki makna. Kedua hal itu sebagai penanda bahwa perlu

kepedulian akademisi untuk memberikan pencerahan pada publik, khususnya pada penyelenggara negara melalui hasil riset agar pemerintah melayani, menghormati, dan memenuhi hak umat beragama, apa pun agamanya, terutama minoritas yang rentan diperlakukan tidak bijak oleh pemerintah dan umat mayoritas. Riset ini data diperoleh dengan wawancara, observasi, dan forum group discussion dengan umat agama Baha'i di Desa Cebile Kidul, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, Jawa Tengah yang mana hak sipilnya tak dilayani, seperti tak dipenuhinya permohonan penerbitan akta perkawinan warga Baha'i yang kawin secara Baha'i, kolom agama dalam KTP diberi tanda setrip (-), sekolah formal tidak diberi pelajaran agama Baha'i bahkan harus pindah agama lain (satu di antara agama mayoritas), dan pemakamannya disendirikan dengan pemakaman umum.

Kata Kunci: kebebasan beragama, hak asasi manusia, dan kewajiban pemerintah

PENDAHULUAN

Pijakan awal bagi umat beragama agar tak merasa paling benar dan menyalahkan agama pihak lain adalah memahami ajaran tiap agama (agamanya dan agama orang lain). Bagi ilmuwan, mempelajari agamanya merupakan sebuah keniscayaan, sedangkan memahami/memelajari agama pihak lain kedudukannya sebagai pengetahuan merupakan hal lazim sebagai fondasi terwujudnya toleransi bila menyadari perbedaan. Hasil memahami ajaran agama lain, akan muncul pemahaman bahwa setiap agama mengajarkan kebajikan hidup bagi umat beragama (nya) dan manusia, sedangkan ajaran setiap agama benar menurut masing-masing pemeluknya. Mengapa agama mengajarkan kebajikan hidup? Agama apa pun sebagai sumber kehidupan yang bersifat rohani bagi umatnya. Dengan demikian, perlu mengenal ragam ajaran agama sebagai pengetahuan (PP No. 55 Thn. 2007).

Dalam ajaran Hindu dikenal tiga dasar kerangka agama (yang menyatu), yakni (1) *tatwa* /filsafat, yakni mendalami ajaran ketuhanan, (2) *susila*/etika, yakni berperilaku baik, (3) upacara /yadnya /ritual, yakni persembahan. Ketiganya ibarat telur yang terdiri kulit (upacara), putih telur (*susila*), dan merah telur (*tatwa*). Jadi, antara pikiran, ucapan, dan

perbuatan harus bersih. Dikenal pula *Dasasila* Hindu (10 perbuatan mulia): *ahimsa* (tak membunuh/ menyakiti), *brahmacari* (mengendalikan nafsu birahi), *satya* (setia, jujur, tulus, terusterang), *awyawahara* (usaha dengan ikhlas), *akrodha* (tak mudah marah), *asteniya/ asteya* (tak mencuri), *guru susrusa* (hormat guru), *sauca* (menjaga kesucian lahir batin), *aharalagawa* (makan dengan sederhana), dan *apramada* (menaati ajaran Weda). Bila melanggar mendapat Karmaphala (sanksi karena perbuatan). Dikenal pula prinsip hidup (panca sradha, lima keyakinan), yakni (1) percaya adanya Tuhan (Brahman, Sang Hyang Widi, Tuhan Yang Maha Esa), (2) percaya adanya Atman (roh) yakni percikan terkecil dari Tuhan yang masuk dalam tubuh makhluk, (3) percaya adanya hukum karmaphala bahwa setiap perbuatan ada hasilnya (baik perbuatan yang baik (*subakharma*) atau buruk (*asubakharma*). Bila *asubakharma* maka roh seseorang belum bisa menyatu dengan Tuhannya (karmawasana) sehingga masuk neraka. Bagi yang meninggal dalam kondisi subakharma maka pemakaman model ngaben untuk memberishkan kejelekannya dengan mengembalikan jasad pada asalnya (tanah), (4) percaya *samsara/punarbawa* yakni menitis kembali dalam bentuk yang sesuai

perilakunya, dan (5) percaya muksa (menyatu dengan Tuhan). Dalam berperilaku berpantangan melakukan delapan hal (sapta tamira), yakni dengki irihati, sombong, bohong, jahat, angkuh, menipu, menyiksa, dan membunuh (ahimsa).

Dalam ajaran Buddha terdapat pancasila (5 dasar) yang dilakukan umat awam dengan menghindari: pembunuhan, pencurian, perbuatan asusila, bicara bohong, makan dan minuman yang memabukkan dan ketagihan. Atasila/Hastaariya (8 dasar) yakni pancasila ditambah 3 hal (tak makan setelah lewat tengah hari, tak menari/bermain musik, dan tak menghias diri). Dasasila, dasaparamita, sepuluh kesempurnaan, sepuluh jalan kebajikan yang dilakukan samanera/samaneri (istilah dalam pendidikan keagamaan Islam adalah santri) dan bikhu/bikhuni (guru Buddhis) yakni pancasila dan atasila ditambah dua hal, yakni tak tidur di tempat mewah atau lebih tinggi di atas pantat dan tak menerima uang, emas, dan perak. Hasta Ariya Marga, delapan jalan kebajikan dengan perilaku benar dalam: berpengertian, pikiran, ucapan, perbuatan, pencaharian/ usaha, perhatian, dan samadi. Bila mampu melaksanakan dengan baik maka pascakematian, melakukan reinkarnasi, yakni mencari tempat lahir pasca kehidupan di dunia (tumimbal lahir) menjadi dewa. Kehidupan setelah kematian sangat tergantung karma/budi pekerti tatkala hidup di dunia. Bila tak mampu melaksanakan ajaran dengan baik, pascakehidupan di dunia (kematian) menduduki kehidupan alam asor, rasekso (status rendah) atau alam jin sehingga tidak menyandang kesucian. Dalam ajaran Buddha, jenazah dapat dikebumikan (dikubur), dikremasi (dibakar, dibesmi, diobong), dilarung ke

laut/air, ditarang (ditaruh di tempat yang berada di atas agar lenyap diterpa angin).

Dalam ajaran Konghucu dikenal Djien Gie Lee Ti Sien (berbudi luhur), setia universal (pada Tuhan, leluhur, keluarga, saudara, sesama, negara kelahiran/Tanah Air), tahu aturan, bijaksana, dan tahu malu. Pantangan dalam Konghucu yakni yang tak susila jangan dilihat, didengar, diucapkan, dan jangan dilakukan. Dalam agama Tao dikenal ajaran/hukum, yakni karma baik-buruk, sebab-akibat yang tergantung perbuatan manusia. Dalam Katolik dikenal sepuluh perintah Allah yang diringkas menjadi hukum dan cinta kasih berupa Akulah Tuhan, Allahmu, jangan menyembah berhala, berbaktilah kepada-Ku saja, dan cintailah Aku lebih dari segala sesuatu; jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan tak hormat; kuduskanlah hari Tuhan; hormatilah ibu-bapakmu; jangan membunuh; jangan berzina; jangan mencuri; jangan bersaksi dusta tentang sesamamu; dan jangan menginginkan milik sesamamu secara tak adil. Dalam Kristen dikenal Dasa Firman/Dasa Titah (dekalog) yakni daftar perintah dan moral memuat empat aturan kultis (hubungan manusia dengan-Nya) dan 6 aturan etis (hubungan manusia dengan manusia). Keempat kultis berupa Akulah Allahmu jangan ada padamu Allah lain di hadapan-Ku; jangan membuat patung untuk disembah; jangan menyebut nama Allahmu dengan sembarangan; ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat (Tuhan selama 6 hari menciptakan langit, bumi, dan seisinya. Pada hari ke-7 Tuhan berhenti bekerja dan memberkati hari itu). 6 etis: hormatilah ayahmu dan ibumu; Pantangan berupa membunuh; berzina; mencuri; saksi dusta; dan menginginkan rumah (milik) sesamamu. Era Nabi Musa (Perjanjian Lama) ada 10 inti ajaran Taurat, tegas dalam hukuman mati,

misalnya zina dirajam (dilempari batu), menghujat Tuhan digantung. Era Isa (Perjanjian Baru) ada 10 kebahagiaan hidup (inti ajaran moral) tertuang dalam Injil. Bila manusia salah dan bisa berubah baik, tak diberi sanksi (prinsip pertaubatan dan pengampunan). Hal yang dipegang teguh: kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dengan segenap kekuatan. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri.

Bagi komunitas Samin (pemeluk agama Adam) memiliki prinsip berpantangan yakni ojo drengki (memfitnah), ojo srei (serakah), ojo panasten (mudah tersinggung/membenci sesama), ojo dahwen (mendakwa tanpa bukti), ojo kemeren (iri hati/sirik atau keinginan memiliki barang milik lain), ojo nyiyo marang sepodo (berbuat nista pada sesama, bejok reyot iku dulure, waton menungso tur gelem di ndaku sedulur (menyia-nyiakan orang lain tak boleh, cacat apa pun asal manusia ya saudara jika mau dijadikan saudara), bedok/menuduh, colong/mencuri, pethil/mengambil yang menyatu dengan alam, sayur di ladang, jumput/mengambil barang, nemu wae ora keno. Ajaran perintah dalam Samin, yakni Kudu Weruh the-e dewe, Lugu (konsisten dalam janji), Mligi (taat ajaran), dan Rukun dengan siapa saja, harapannya hidup seger waras (sehat sentosa), rukun, dan becik-apek sak rinane sak wengine.

Dalam Islam di antaranya memuat lima prinsip penghormatan pada manusia/al-ushulul khamsah perspektif ushul fikih yakni menjaga jiwa/kehormatan/chifdzu an-nafs (pantangan membunuh), menghormati agama/rukun antar dan intern-umat beragama (chifdzu ad-din), harta benda/tak mencuri (chifdzu al-mal), identitas asal-usul/keturunan/jati diri (chifdzu an-nasl), dan jaga kehormatan (chifdzu al-'irdh) dan warning: siapa

yang membunuh seorang manusia, seakan-akan dia membunuh semua manusia dan yang memelihara kehidupan seorang manusia seolah-olah memelihara kehidupan semua manusia (Al-Maidah:32). "Hai kaum beriman, jangan mengolok-olok yang lain, boleh jadi yang diolok-olok lebih baik daripada yang mengolok-olok" (al-Hujurat:11). Al-Quran surat al-Hujurat:6 "Hai orang yang beriman, jika datang padamu orang fasik (beribadah juga bermaksiyat) membawa berita, periksalah dengan teliti agar kamu tak menimpakan musibah pada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu". Al-Hujurat:11 "Hai kaum yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, boleh jadi yang diolok-olok lebih baik daripada yang mengolok-olok". Al-Maidah: 32 "Barang siapa yang membunuh seorang manusia, seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Al-Maidah:48 "Seandainya Tuhan menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat saja. Tapi Tuhan hendak mengujimu dengan perbedaan. Berlombalah meraih kesuksesan". Selain agama tersebut, dikenal pula agama lokal (khas Nusantara), yakni Sunda Wiwitan (Jawa Sunda) di Kenekes, Lebak, Banten; Cigugur/aliran Madrais di Kuningan Jawa Barat, Buhun di Jawa Barat, Kejawen di beberapa daerah di Jawa Tengah dan Jawa Timur, Parmalim di Batak, Sumatera Utara; Kaharingan di Kalimantan; Tonaas Walian di Minahasa Sulawesi Utara, Tolottang di Sulawesi Selatan, Aluk Todolo di di Tana Toraja/Tator, Toraja Utara, dan Mamasa; Wetu Telu di Lombok, NTB; Naurus di Pulau Seram, Maluku; Marapu di Sumba, dsb.

Keragaman telah diakui oleh founding fathers negeri ini yang diwujudkan dengan pencantuman kata Bhinneka Tunggal Ika (BTI) yang tersemat dalam lambang Burung Garuda. Dalam sejarahnya, BTI tertuang dalam puisi Jawa klasik (Kakawin) Sutasoma pada pupuh 139 bait kelima. Bunyinya "Rwaneka dhatu winuwus wara Buddha Wisma/ bhineki rakwa ring apan kena parwanosen/mangkang jinatwa kalawan Siwatatwa tunggal/bhinneka tunggal ika tan hana dharmma mangrwa". Bait yang mencantumkan Bhinneka Tunggal Ika diterjemahkan Dwi Woro Retno Mastuti (Dosen Studi Jawa FIB UI) dengan Hasto Bramantyo (dosen STAB Syailendra, Kopeng, Salatiga): Konon dikatakan bahwa wujud Buddha dan Siwa itu berbeda/ Mereka memang berbeda, namun bagaimana kita bisa mengenal perbedaannya dalam selintas pandang/karena kebenaran yang diajarkan Buddha dan Siwa itu sesungguhnya satu jua/ Mereka memang berbeda-beda, namun pada hakikatnya sama karena tidak ada kebenaran yang mendua. Siapa Sutasoma? putra mahkota Raja Hastina Sri Mahaketu, ia menolak dinobatkan menjadi raja. "Saya (Sutasoma) tidak mempunyai keinginan apa pun selain pergi ke tempat sunyi di hutan untuk melakukan disiplin spiritual (pupuh 4 bait 13). Pangeran Sutasoma muda (sebagai titisan Buddha) akhirnya pergi dari kerajaan tanpa sepengetahuan siapa pun. Perjalanan Sutasoma dikenal 'jalan kebenaran Buddha' dengan prinsip hidup buddhis: mendapati musuh tak untuk dihancurkan, tapi dirangkul dan dijadikan teman. Musuh dinasehati agar meninggalkan kejahatan dan menjadi orang baik dan berguna. Pihak yang memusuhi Sutasoma adalah Gajawaktra, Nagaraja, dan macan betina. Sang macan karena kelaparan, ia akan memangsa anaknya, tetapi dilarang oleh Sutasoma

agar sang macan memangsa Sutasoma. Tatkala taring macan betina menancap di dada Sutasoma, darahnya mengucur menjadi amerta (air kehidupan) yang memuaskan macan betina, meski sang macan menyesal karena membunuh Sutasoma. Ia menghendaki menebus rasa bersalah agar dibunuh, ia juga berniat bunuh diri. Raja Dewa Indra mengetahui rencana bunuh diri macan betina, sang raja menghidupkan Sutasoma. Mohammad Yamin (1903-1962) mencuplik kata Bhinneka Tunggal Ika sebagai seloka Tantular dan dicantumkan dalam lambang negara Garuda Pancasila buatan Sultan Abdul Hamid Pontianak. Lambang negara itu kemudian disahkan Kabinet Republik Indonesia Serikat (RIS) pada 11 Februari 1950. Realitas kehidupan yang nampak adalah keragaman (diversity) yang tak dapat selalu diseragamkan (uniformity) modal menuju kesatuan dalam keragaman (unity in diversity).

Upaya pemerintah melestarikan keragaman sebagai saksi dan bukti bahwa pemerintah menjadi pihak yang terbukti mampu menyikapi ujian Tuhan atas keragaman suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Akan tetapi, bila keragaman dipaksakan untuk sama pada dasarnya menyalahi kodrat (kuasa Ilahi). Arogansi penguasa, pengayoman pada yang jelata atau keramahan/kebijakan penguasa terhadap umat mayoritas atau minoritas keduanya (arogan atau mengayomi) sama-sama selalu dikenang publik sepanjang sejarah peradaban manusia. Penguasa yang mengayomi berperan sebagai negarawan, yakni sosok yang memiliki dimensi etik-ideologis sebagai ahli/pakar tata-kelola negara (eksekutif, legislatif, yudikatif) yang memiliki kapasitas patriotik dan watak pembela Tanah Air. Sekaligus pemimpin yang mampu sebagai penyelenggara

negara, yakni menjalankan fungsi sebagai pelaksana ketatanegaraan.

Ajaran agama di atas untuk dijadikan pijakan dalam bermasyarakat bagi bangsa mana pun, terutama bangsa Indonesia yang memiliki ragam suku, agama, ras, dan antar-golongan (SARA) dan tata pemerintahan yang khas. Indonesia bukanlah negara sekuler, republik sekuler, negara kerajaan, negara ateis, negara teokrasi (theocratic state) atau religious state tapi negara republik berlandaskan Pancasila. Konsekuensinya negara memfasilitasi agama untuk tumbuh, semua agama kedudukannya sama di depan hukum dan negara tak mencampuri keyakinan umat beragama, tapi negara melindungi warga negaranya yang beragama.

Bangsa Indonesia mempunyai kepedulian yang tinggi pada tradisi agama dan bertekad menjadikan negaranya modern dan demokratis, sehingga tradisi dan aspirasi agama diberi tempat khusus dalam struktur pemerintahan, yakni adanya kementerian agama dengan dukungan anggaran negara. Hal ini merupakan keunikan khas Indonesia, perlu dibanggakan dan meski perlu dicermati untuk kajian akademik, misalnya bagaimana hubungan agama dan negara? Benarkah negara membatasi jumlah agama? Bagaimana negara menyikapi pluralitas paham dan aliran kepercayaan? Mengapa ada kantor yang hanya mengurus agama Islam saja, padahal namanya Kantor Urusan Agama (KUA). Lantas umat beragama yang lainnya bagaimana pelayanannya oleh negara di level akar rumput? Satu hal penting yang perlu didalami bahwa agama memiliki kekuatan menciptakan kohesi dan solidaritas kelompok seiman dan antar-iman, sekaligus menyimpan kekuatan disintegrasi sosial ketika berhadapan dengan pemeluk agama yang berbeda karena terjadi konflik antar dan

intern-pemeluk agama. Idealnya, negara menjaga jarak yang sama antar-agama dalam pelayanan. Hal tersebut merugikan warga negara bila pelayanan yang tidak optimal oleh negara. Di tengah era transparansi, negara harus makin menyadari bahwa semua pihak termasuk warga minoritas leluasa menyampaikan aspirasi di tengah mayoritas.

Satu hal yang menarik untuk dipahami bahwa Indonesia tersohor sebagai negara yang toleran dan dipuja-puja bila ada pejabat mancanegara yang berkunjung di Indonesia. Begitu pula, pemimpin negeri mengiklankan tingginya toleransi pada dunia. Ketersohoran itu dijadikan modal berdiplomasi bagi pejabat negeri yang berkunjung ke mancanegara. Sebagaimana tujuan kunjungan Presiden Jokowi ke Amerika dan bertemu Presiden AS Barack Husein Obama Senin 26 Oktober 2015 di Gedung Putih, AS. Menurut Menlu RI Retno LP Marsudi, Indonesia ingin memanfaatkan posisi strategis sebagai negara berpenduduk Islam terbesar di dunia, juga negara demokrasi terbesar ketiga. Dengan mengembangkan toleransi, pluralisme, dan demokrasi. Jokowi dalam kunjungan tersebut membahas masalah politik, ekonomi, dan budaya (Kompas, 27 Okt. 2015).

Jumlah muslim di Indonesia lebih besar dari jumlah seluruh muslim di semua Negara Timur Tengah jika digabungkan. Dengan demikian, mayoritas jumlah harus diimbangi dengan kualitas beragama. Ukuran kualitas bila menjadi umat yang toleran dengan sesama makhluk Tuhan, apa pun agamanya. Julukan bahwa Islam di Indonesia mampu menyinergikan Islam, demokrasi, dan modernitas merupakan tantangan untuk diwujudkan dengan optimal. Terlebih Presiden Jokowi mendeklarasikan Hari Santri yang ditetapkan pada 22 Oktober di hadapan

para ulama dan ribuan santri di Masjid Istiqlal Jakarta, Kamis 22 Oktober 2015.

Untuk mengoptimalkan, sebagaimana konsep revolusi mental yang dicanangkan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK), dapat terealisasi, menurut Prasjo, dimulai dari penyelenggara negara, yakni politisi, penegak hukum, dan pejabat birokrasi. Mengapa birokrasi? birokrasi adalah alat negara yang sehari-hari menjalankan pelayanan pemerintahan dan pembangunan sebagai tolok ukur terdepan penampilan negara kepada rakyatnya. Dengan demikian, perlunya dipahami pertama, nilai dasar yang eksis dalam birokrasi dengan mencari penyebab faktor eksisnya birokrasi yakni minta dilayani, berafiliasi dengan kekuasaan politik, dan tidak sensitifnya atas kebutuhan dan pelayanan kepada masyarakat. Birokrasi ini terbentuk dari proses perekrutan dan penempatan pejabat yang tertutup, tak berbasis kompetensi dan kinerja, tapi karena kedekatan hubungan baik secara politik, kekerabatan, kekeluargaan, dan kemampuan membayar. Kedua, orientasi pada peraturan perundangan dalam melaksanakan tugas. Ketiga, tidak mementingkan kepentingan unitnya, instansinya, dan sektornya yang dipicu oleh manfaat yang bisa diterima pegawai dan kelompoknya. Keempat, mental korup menjadi produk dari kelemahan sistem yang mengganggu jalannya pemerintahan. Kelima, belum terbangunnya nilai budaya kinerja. Perlunya berpegang pada prinsip reformasi birokrasi bahwa komitmen dan keteladanan pemimpin secara kolektif menjadi syarat dasar keberhasilan (Prasjo, 2015). Sejauhmana syarat tersebut berjalan optimalnya? Naskah ini memotretnya dari aras yang paling bawah dan sederhana yakni pelayanan hak sipil umat agama Bahai di oleh pemerintah di

Desa Cebilek Kidul, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati Jawa Tengah.

Dengan paparan di atas, penulis mengharap semoga pemimpin negeri ini mempunyai kepedulian yang tinggi dalam mengayomi, melindungi, dan memfasilitasi kebutuhan umat beragama, apa pun agamanya. Terutama yang sering dijadikan sasaran amuk massa (karena jumlahnya terbatas atau karena tidak mempunyai perwakilan di parlemen karena tak mendukung secara terus terang dalam pemilihan wakil rakyat) agar umat beragama nyaman dan saleh dalam kehidupannya. Kepedulian itu didasari dengan logika birokrasi di atas. Pemimpin yang peduli terhadap nasib wong cilik akan selalu dikenang oleh umat manusia sepanjang sejarah karena diukir dalam peradaban demi terwujudnya kehidupan yang memulyakan manusia dengan sejati. Penguasa pun harus sigap bahwa pemicu konflik apa pun basis persoalannya dipicu oleh ketimpangan sosial dan ekonomi. Hal ini dapat diukur dengan barometer sosial. Menurut Takwin, barometer sosial (BS) merupakan produk pemantauan dan audit sosial terhadap kinerja dan capaian pembangunan dengan menggunakan kebijakan program sosial sebagai indikatornya untuk mendeteksi ketimpangan sosial. Ukuran dalam BS adalah berasal dari persepsi warga. BS merupakan turunan dari konsep keadilan sosial yang diartikan sebagai perwujudan kesempatan dan peluang hidup yang setara. Keadilan sosial didasari oleh postulat bahwa setiap individu harus diperdayakan untuk mengejar arah kehidupan yang ditentukannya sendiri dan untuk terlibat dalam partisipasi sosial yang luas. Prinsip keadilan sosial adalah akses, partisipasi, hak, harmoni, distribusi, diversitas, dan lingkungan yang mendukung. Dimensi keadilan sosial adalah (1) pencegahan kemiskinan,

(2) akses ke pendidikan, (3) inklusi pasar tenaga kerja, (4) kohesi sosial dan nondiskriminasi, kesehatan, dan (5) keadilan antargenerasi (Takwin, 2015).

PEMBAHASAN

Dasar Hukum Beragama

Angin kemajemukan dihembuskan oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dengan menginventarisasi agama lokal selain agama yang tertera secara eksplisit dalam perundangan. Hal itu untuk dikaji kemungkinannya dikembangkan menjadi direktorat jenderal tersendiri. Harapannya pelayanan pada pemeluk agama minoritas dan agama lokal bisa dilakukan (Kompas, 17 Sept. 2014). Upaya itu merupakan langkah bijaksana yang harus diwujudkan pemerintah, argumennya:

Pertama, beragama merupakan hak pribadi. Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Politic Rights/ICCPR merupakan kovenan HAM internasional yang disahkan tahun 1966 yang mulai berlaku 1976. ICCPR diratifikasi dalam UU No.12/2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik mengandung dua kata kunci (a) hak *derogable*, hak yang boleh dikurangi/dibatasi pemenuhannya oleh negara bagi warga negara meliputi hak bebas berkumpul secara damai; hak berserikat termasuk membentuk dan menjadi anggota serikat buruh; dan hak atas bebas berpendapat/berekspresi termasuk bebas mencari, menerima dan memberi informasi dan segala macam gagasan tanpa memperhatikan batas (lisan atau tulisan). Negara boleh menyimpang atas kewajiban memenuhi hak bila mengancam kehidupan dan tak diskriminatif. Hal ini demi keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan, moralitas umum dan menghormati hak kebebasan orang lain, (b) hak non-

derogable (hak absolut) tak boleh dikurangi pemenuhannya oleh negara walau keadaan darurat berupa hak dasar: hak hidup (*rights to life*); bebas dari penyiksaan (*right to be free from torture*); bebas dari perbudakan (*right to be free from slavery*); bebas dari penahanan karena gagal memenuhi perjanjian (utang); bebas dari pemidanaan berlaku surut; sebagai subyek hukum; dan hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama. Kebebasan beragama merupakan salah satu hak yang disebut sebagai *universal inalienable* (tidak bisa dilenyapkan), *inviolable* (tidak dapat diganggu gugat), dan *nonderogable human rights* (hak-hak asasi yang tidak boleh dilanggar). Bila negara melanggar dikecam sebagai pelanggar HAM (*gross violation of human rights*). UU No.23/2014 tentang Pemda diharapkan mampu mencegah pelanggaran HAM oleh Pemda karena ada sanksi bagi pemda yang melanggar HAM. Data Komnas HAM RI lima tahun terakhir 2010-2015, Pemda menduduki peringkat ketiga sebagai lembaga yang diajukan publik ke Komnas HAM karena pelanggaran HAM. Hal ini akibat semakin besarnya kekuasaan pemda, misalnya mala-administrasi, konflik lahan, dan pembiaran masalah etnis. Peringkat pertama adalah Polri disusul korporasi. Sebelum era reformasi, TNI, korporasi, dan pemerintah pusat paling banyak dilaporkan masyarakat ke Komnas HAM (Kompas, 30 Juni 2015).

Kedua, sebelum agama besar (jumlah pemeluknya banyak) eksis di negeri ini, bangsa Indonesia memiliki agama lokal, sebut saja agama Talotong di Sulawesi, Sunda Wiwitan di tatar Sunda, Parmalin di Sumut, agama Adam bagi wong Samin, dsb. Agama lokal tersebut 'dikerdilkan' oleh negara dengan dalih, di antara agama lokal 'nakal'. Kecurigaan yang diwariskan oleh rezim

masa lalu dapat dipangkas secara perlahan manakala agama minoritas dan agama lokal difasilitasi negara sebagaimana fasilitas pemeluk agama mayoritas. Menjembatani keinginan warga yang masih memertahankan agama yang belum tereksplisitkan dalam perundangan dan agama lokal, langkah bijaksana yang harus dipahami pemerintah adalah melayaninya dalam bentuk satu direktorat di bawah Kementerian Agama. Selama ini, Kemenag tak mampu menjaga jarak (kedekatan) yang sama antara agama besar (mayoritas) dengan minoritas tapi cenderung lebih dekat dengan yang mayoritas. Sudah saatnya pemerintah melaksanakan amanat perundangan yakni menghormati (to respect), melindungi (to protect), dan memenuhi hak (to fulfill) agama warganya belum dikenal publik karena tidak tersosialisasikannya secara luas. Hal ini sebagaimana agama Baha'i yang hak umat beragamanya belum/tidak difasilitasi dengan dalih tidak diakui. Padahal, Negara tidak pernah membatasi jumlah agama yang dipeluk warga negara di negeri ini.

Ketiga, kecenderungan kontemporer di bidang agama sangat sulit untuk dibingkai dalam sebuah kerangka yang membatasi pluralitas. Kebijakan pluralitas setengah hati oleh pemerintah dari masa ke masa tidak bisa mewadahi pertumbuhan gerakan agama baru (Jamil, 2008).

Pengenalan Awal Agama Baha'i

Agama Baha'i menjadi polemik (diperbincangkan publik) di dunia online sejak 24 Juli 2014, mengapa? Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menegaskan melalui akun twitternya bahwa kementeriannya sedang mengkaji agama Baha'i (Kajian sudah diawali sejak Menag Suryadharma Ali (SDA) era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

(SBY). Apakah agama Baha'i bisa diterima sebagai agama baru di Indonesia atau tidak diterima. Kajian ini dilakukan setelah Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi (era Presiden SBY) mengirimkan surat pada Menag SDA yang mempertanyakan perihal Baha'i kaitannya dengan pelayanan kependudukan. Twit tersebut secara singkat: pemerintah Indonesia menambah daftar agama baru yang secara resmi diakui. Setelah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu, pemerintah menyatakan bahwa Baha'i merupakan agama yang keberadaannya diakui konstitusi. Hal itu diutarakan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin melalui akun twitter @lukmansaifuddin pada 24 Juli 2014 pukul 19:55. Alasan yang dijadikan dasar pengakuan sebagai agama yang diakui pemerintah dalam 10 serial kultwit. Awalnya Mendagri bersurat pada Menag, apakah Baha'i benar merupakan salah satu agama yang dipeluk penduduk Indonesia? Pertanyaan berkaitan keperluan Kemendagri sebagai dasar pelayanan administrasi kependudukan (KTP, KK, dsb.). Selaku Menag menjawab: Baha'i merupakan agama dari sekian banyak agama yang berkembang di 20 negara. Baha'i suatu agama, bukan aliran dalam agama. Pemeluknya tersebar di beberapa daerah di Indonesia. Baha'i termasuk agama yang dilindungi konstitusi sesuai Pasal 28 E dan 29 UUD '45 dan Penpres Nomor 1/PNPS/1965. Menag Lukman berpendapat, umat Baha'i sebagai WNI berhak mendapat pelayanan kependudukan, hukum, dll dari pemerintah. Rapat Kerja Nasional (Rakernas) MUI Agustus 2014 Menag Lukman pun meminta masukan terkait otoritas pemerintah dalam menetapkan satu keyakinan bisa disebut agama. Permintaan ini sebatas permintaan karena amanat Pasal 29 UUD 1945 secara tegas menandakan bahwa beragama adalah

hak individu, apa pun agamanya dan negara tak membatasi jumlah agama. Hal ini tertuang dalam Penjelasan Pasal 1 Penpres Nomor 1/PNPS/1965.

Agama Baha'i berkembang pesat di Iran sehingga Baha'ullah (deklarator agama Baha'i) dipenjara di benteng Mah-Ku (pegunungan Azerbaijan) lalu dipindah ke benteng Chiriq. Pada 9 Juli 1950 dieksekusi di Kota Tibriz dan jenazahnya diambil pengikutnya secara diam-diam ke Bukit Karmel di Israel. Dalam prediksi Sang Bab, akan hadir perwujudan Tuhan (dalam istilah lain disebut nabi) yakni Mirza Husayn Ali (Abdul Baha'), anak Sang Bab. Pada tahun 1852 Abdul Baha' tatkala dipenjara di bawah tanah Siyah-Chal (Iran) menerima wahyu pertama yang menjelaskan bahwa ia sebagai perwujudan Tuhan, sebagaimana prediksi Sang Bab. Abdul Baha' lahir pada 23 Mei 1844 (bertepatan dengan Sang Bab mengumumkan misinya sebagai pesuruh Tuhan) dan sejak usia 8 tahun, Abdul Baha' mendampingi Baha'ullah di pengasingan. Imbas Revolusi Pemuda Turki tahun 1908 Abdul Baha' dibebaskan dari penjara. Pada tahun 1910-1913 Abdul Baha' melakukan perjalanan ke Mesir, Inggris, Skotlandia, Perancis, Amerika Serikat, Jerman, Austria, dan Hungaria menyampaikan risalah pada organisasi pendukung perdamaian, dosen, dan publik. Pada tahun 1921, Abdul Baha' wafat di Haifa Israel dan dimakamkan di salah satu ruang dalam kompleks makam Baha'ullah. Sebelum wafat, Abdul Baha' menulis surat wasiat bahwa ia menunjuk Shoghi Effendi (anak Abdul Baha' yang juga cucu Baha'ullah) sebagai 'wali agama'. Shoghi menerjemahkan Tulisan Suci Baha'ullah dan Abdul Baha' (semula berbahasa Persia) ke dalam bahasa Inggris. Shoghi wafat pada tahun 1957 (Sasmita, 2010). Sumber ajaran

Baha'i tertuang dalam Kitab al-Aqdas, hasil proses pewahyuan yang diterima Baha'ullah dari Tuhan secara langsung. Keberadaan utusan Tuhan dalam konsep Baha'i berpijak pada prinsip bahwa sejauh manusia mampu menghitung angka, itulah jumlah nabi di dunia. Maksudnya, nabi jumlahnya tak terbatas. Kitab al-Aqdas diterjemahkan oleh Balai Keadilan Sedunia (Majelis tertinggi agama Baha'i) yang bertugas di antaranya menerjemahkan ajaran agama Baha'i pascawafatnya Shoghi Effendi.

Ajaran Bahá'í terdapat 12 asas, yakni keesaan Tuhan, kesatuan agama, persatuan umat manusia, persamaan hak antara kaum wanita dan kaum pria, penghapusan segala macam prasangka buruk, perdamaian dunia, persesuaian antara agama dan ilmu pengetahuan, mencari kebenaran secara bebas, keperluan untuk pendidikan universal yang wajib, keperluan untuk bahasa persatuan sedunia, tidak boleh campur tangan dalam politik, dan penghapusan kemiskinan dan kekayaan yang berlebihan.

Tujuan Menulis tentang Agama Baha'i
Mewujudkan kesuksesan hidup tiap warga negara merupakan kewajiban negara memfasilitasinya. Akan tetapi, hidup yang sukses seringkali diidentikkan oleh 'mazhab' materialisme yang menjadikan kekayaan, jabatan, dan ketenaran sebagai tolok ukurnya. Dampaknya, dimensi kemanusiaan cenderung terabaikan sehingga kelelahan fisik karena kerja berlebih menjadi stres dan depresi berimbas menjadi penyakit sosial dan munculnya kelelahan psikis. Kenyataan sosial tersebut maka perlu dirumuskan hakikat kesuksesan yang tak hanya meraih kekayaan (money) dan kekuasaan (power) yang sudah tidak memadai lagi. Para motivator

merumuskannya berupa empat konsep kesehatan lahir-batin (well being), ketakjuban (wonder), kearifan (wisdom), dan sikap pemberi (giving). Indikator kesuksesan terumuskan dengan terwujudnya kebermaknaan hidup dan tumbuhnya jiwa (thrive). Problem warga dunia adalah kesejahteraan yang tidak merata yang terjadi ketimpangan sosial. Di sisi lain, potret kehidupan miskin memprihatinkan yang dialami pengojek sepeda di Jakarta. Gambaran di atas agar tak kian senjang, dalam agama diajarkan berzakat, sedekah, infak, dan amal lainnya atau karya nyata, tidak melulu 'berfatwa'.

Dalam agama Baha'i pun berobsesi mewujudkan kehidupan umat manusia yang tidak senjang. Di sisi lain, ada upaya pihak yang mampu pada pihak yang papa karena iba dengan kerendahan hati untuk mengulurkan sebagian rizkinya tanpa pertimbangan agama si penerima. Upaya menyantuni minoritas pada mayoritas kadangkala dipahami dengan pola pikir sempit, yakni agamaisasi. Padahal, yang menjulukinya belum tentu tumbuh iba dengan menyantuni yang papa. Dalihnya, pemberian itu bertepatan dengan hari besar agama penyantun atau memanfaatkan lemahnya pihak yang disantuni. Kecuriagaan itu benar bila menyantuni dengan prasyarat, misalnya harus masuk agama si penyantun atau mengikuti kegiatan keagamaan penyantun. Bagi si papa yang menerima santunan, mereka akan menjawab 'anjing menggonggong kafilah berlalu' yang terpenting bagi si penerima terpenuhi hak dasarnya dan tak mengubah akidahnya, baik karena prasyarat penyantun atau faktor lain. Dalam kaca mata publik, yang dibutuhkan adalah karya nyata (Rosyid, 2015).

Karya nyata itu di antaranya dilakukan oleh umat agama Baha'i (disebut mukmin) yang berbuat baik

dengan lingkungannya dalam konteks kemanusiaan yang seagama atau berbeda agama. Perbuatan baik itu berupa memberi beasiswa dan menetap di rumah mukmin pada siswa yang karena kemiskinan dengan tujuan menolong, meski tradisi doa (membaca kalimat suci karya Baha'ullah) bersama secara Baha'i diberlakukan pada mereka yang menerima beasiswa. Di sisi lain, doa bersama dapat dilakukan dengan bersumber dari kitab suci agama non-Baha'i. Akan tetapi, upaya itu dipandang sebagai upaya bahaisasi oleh sebagian warga. Dengan ditulisnya naskah ini, penulis berharap agar perbuatan baik tidak dicurigai berlebihan sehingga munculnya persoalan teratasi dengan bijak.

Menyikapi tuduhan tersebut, penulis sebagai dosen di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kudus Jawa Tengah di bawah naungan Kementerian Agama RI tergugah untuk urun rembuk dalam aspek pemikiran.

Pemikiran pertama, didukung Deklarasi Manado yang dihasilkan dalam forum The Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS) XV pada 3 s.d 6 September 2015 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado. Tema yang diangkat Harmony in Diversity: Promoting Moderation and Preventing Conflicts in Socio-Religious Life. Ada lima butir deklarasi Manado, (1) meyakini bahwa keragaman bangsa Indonesia adalah sumber kekuatan, (2) bertekad menjaga suasana damai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara untuk Indonesia yang kuat, sejahtera, dan berdaulat, (3) akan bahu-membahu dengan semua komponen bangsa untuk mencegah setiap usaha, gerakan, dan pemikiran yang dapat mengusik kedamaian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, (4) mendukung setiap langkah negara untuk mencegah

berkembangnya segala bentuk fanatisme, ekstremisme, dan radikalisme yang mengatasnamakan suku, agama, ras, dan golongan, (5) mengajak semua komponen bangsa untuk berperan aktif dalam menegakkan nilai-nilai kebersamaan dan menjaga kedamaian. Kelima poin tersebut menandakan ada hal ekstra penting sehingga penulis terhenyak untuk menulis buku ini terutama poin ketiga. Maksudnya, upaya mencegah (prevensi) sebagai langkah utama bila benih-benih yang mengusik kedamaian berbangsa yang bersumber dari pemahaman umat beragama terhadap agama lain hanya karena fanatisme sempit perlu diperbaiki. Bentuk perbaikannya dengan memahami ajaran agamanya dan agama lain sebagai sumber pengetahuan berpijak dari riset. Imbasnya terwujudnya/terbukanya cakrawala pandang yang mengedepankan hati nurani merupakan hal pokok bila ingin mewujudkan Indonesia yang gemah ripah dan aman tenteram berbekal menghormati keragaman SARA.

Pemikiran kedua, berdasarkan deklarasi Malang hasil Konferensi Cendekiawan Muslim, Ulama, dan Sufi Sedunia ke-4 yang diselenggarakan di Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang 23-25 November 2015. Acara dihadiri dari 34 negara mendeklarasikan agar muslim dunia kembali ke ajaran Islam yang bersatu di tengah perbedaan. Ideologi kekerasan dan pemecah belah umat harus diakhiri dengan mewujudkan konsep Islam moderat (wasathiyah) dengan merangkul sesama muslim dan non-muslim. Di sisi lain, hasil riset tak selalu dijadikan pijakan penguasa dalam menentukan kebijakan. Hal ini dinyatakan oleh Iskandar Zulkarnain Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada Pembukaan Kongres Ilmu Pengetahuan Nasional (Kipnas) ke-11 di Jakarta pada 8 Oktober 2015. Kipnas dilaksanakan tiap

empat tahun sejak 1958. Pada dasarnya kontribusi ilmu pengetahuan ditujukan sebagai motor utama peningkatan daya saing bangsa. Pemegang kebijakan cenderung memilih jalan pintas dengan mereduksi aktivitas pengetahuan untuk penguatan industri dan ekonomi tanpa melihat proses yang harus dilalui. Anggaran riset hanya 0,08 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Anggaran ideal riset versi Unesco setidaknya 2 persen terhadap PDB Negara, di Indonesia 2 persen setara dengan Rp 200 triliun (Kompas, 9 Okt. 2015).

Pemikiran ketiga, agama Baha'i menurut Majelis Rohani Nasional (lembaga agama Baha'i tingkat negara) merupakan agama independen dan universal bukan sekte agama tertentu. Deklarasinya Sayyid 'Ali Muhammad dari Shiraz (bergelar Baha'ullah). Pada tanggal 23 Mei 1844 H/1260 M di Iran tatkala berusia 25 tahun, ia mengumumkan sebagai pembawa amanat baru dari Tuhan yang ditakdirkan untuk mengubah kehidupan spiritual umat manusia sedunia. Pengumuman misinya di Taman Ridwan di negara Persia (kini bernama Iran) bertujuan menciptakan kesatuan dan keselarasan di antara agama-agama. Ajarannya (1) mewujudkan transformasi rohani dalam kehidupan, (2) memperbaiki lembaga masyarakat berdasar prinsip keesaan Tuhan, kesatuan agama, dan persatuan manusia, (3) keesaan Tuhan, (4) kebebasan beragama, (5) kesatuan dalam keanekaragaman, (6) peningkatan kehidupan spiritual, ekonomi, sosial-budaya, musyawarah sebagai dasar keputusan, (7) kesetiaan pada pemerintah, (8) mewajibkan pendidikan bagi anak, dan (9) agama harus menjadi sumber perdamaian dan keselarasan berkeluarga, bermasyarakat, dan berbangsa. Dalam Baha'i mencari kebenaran ajaran agama

secara mandiri bagi umatnya dan kebenaran agama adalah tunggal yang memiliki ragam aspek.

Pemikiran keempat, pembicaraan publik tentang agama Baha'i di Indonesia dalam tahap tertentu tidak fair, mencurigainya, dan beranggapan sinis, mengapa? Publik hanya berperan sebagai wasit, meski tidak berada di 'lapangan', tidak memiliki wewenang, dan terkesan asal berpendapat. Imbasnya, kerugian diderita umat Baha'i karena publikasi bersumber dari aras sepihak yang tanpa konfirmasi kebenarannya pada umat Baha'i. Publikasi tertuang dalam media sosial dan media massa lainnya, yang terkesan bebas tak terbatas. Kecurigaan itu imbas kompetisi mencari umat beragama (menjadi tambahan teman seagama). Agama apa pun akan dikembangkan untuk mendapatkan jumlah umat yang banyak. Demikian pula Baha'i dengan bukti adanya pendakwah yang melakukan aksi. Upaya itu dilakukan sebelum didirikannya Badan Keadilan Sedunia (BKS).

Pemikiran kelima, upaya akademisi untuk mendudukkan posisi yang proporsional umat Baha'i yang selama ini dipahami oleh publik secara sepihak. Padahal, ada mutiara yang perlu dijadikan pelajaran hidup bagi siapa saja. Sebagaimana konsep pendidikan universal ala Baha'i yang difasilitasi oleh Institute Ruhi (IR). IR merupakan forum pembelajaran dalam agama Baha'i, lembaga pendidikan di bawah naungan Majelis Spiritual Nasional Baha'i Colombia. IR mendeklarasikan sebagai pengembangan sumber daya manusia untuk pengembangan spiritual, sosial, dan budaya masyarakat. Keberadaan IR sejak tahun 1992 yang dikembangkan ke berbagai dunia. Proses pembelajaran dalam IR tidak hanya umat Baha'i, tapi seluruh umat manusia. Strategi yang dikembangkan berdasarkan pada filsafat

perubahan sosial, pembangunan, dan pendidikan yang mengajarkan nilai universal tentang kebenaran. Proses pembelajarannya dipilah dalam kelompok kecil, dibagi dalam tujuh pembelajaran. Dalam buku 1 merefleksikan kehidupan roh yang memuat tiga komponen, yakni pengenalan tulisan suci Baha'i, doa, seputar kehidupan dan kematian. Buku 2 memuat pelayanan, pengajaran, pendalaman tentang perwujudan Tuhan dan ajaran Baha'i. Buku 3 mengajarkan pada anak dan remaja cara membangkitkan potensi positif diri anak dan remaja dari aspek pendidikan, psikologi, dan budaya, moralitas, toleransi, dan sikap rohani. Buku 4 memuat manifestasi sang Bab dan Baha'ullah dengan kajian universal. Buku 5 menggali potensi anak muda. Buku 6 memberikan cara pengajaran berbasis spiritual. Buku 7 mengulas cara menjadi mentor rohani, jalan rohani, dan mengembangkan seni untuk pengabdian. Pelaksanaan pembelajaran tersebut dalam realitanya tidak sepi dari kecurigaan warga non-Baha'i, sebagaimana dialami mukmin di Lampung dan di Pati.

Pemikiran keenam, belum dipenuhinya hak sipil umat agama Baha'i, sehingga perlu upaya mengingatkan pemerintah agar kewajibannya memenuhi hak umat Baha'i dipenuhi. Negara wajib melindungi hak atas kebebasan (the right to liberty/freedom) terhadap warga negaranya berupa (1) tersedianya perangkat hukum atau UU yang menjamin hak atas kebebasan dasar (fundamental freedom) yaitu beragama, berpikir, dan berkeyakinan, (2) melindungi dengan penegak hukum (law enforcement officials). Pelaku kebebasan tak diganggu, tak diancam, tak diintimidasi, dan tak dianiaya, (3) memastikan pencapaian atas independensi dan imparialitas sistem peradilan dalam penegakan hukum (law

enforcement). Mengapa beragama kategori kebebasan fundamental? Kebebasan itu hak alamiah bersifat kodrati, bukan hak bagi manusia (right for itself) tapi melekat pada diri seseorang (right in itself). Kebebasan beragama tercantum pada Pasal 18 Kovenan Internasional tentang hak sipol (International Covenant on Civil and Political Rights) dan Pasal 28 E (1) dan 29 UUD'45 yang belum ada penjelasan lebih lanjut dalam menjamin kebebasan beragama. Mengulas Hak Asasi Manusia (HAM) terpilah atas HAM absolut dan relatif. HAM absolut adalah HAM yang dalam situasi apa pun tak boleh dikurangi dan dilanggar oleh siapa pun sesuai prinsip nonderogable human rights, yakni hak hidup, tak disiksa, kebebasan pribadi, pikiran dan nurani, kebebasan beragama, tak diperbudak, persamaan di muka umum, dan hak tak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.

Pemikiran ketujuh, mentradisikan berpikir ala mazhab kiri, yakni kritis, progresif, mempertanyakan struktur sosial yang tak adil (pemikiran itu dalam batas ideal). Esensi berpikir kiri adalah penyeimbang, pengingat, penjaga, penjaga harmoni, sedangkan mazhab kanan identik dengan melegitimasi status quo, menganut pemikiran yang mapan, berpihak pada kapitalis, kembali pada agama secara sempit, dsb (Haryanto, 2016).

Pemikiran kedelapan, amanat UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 1 (2) dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 6 (a) prinsip di perguruan tinggi bahwa pencarian

kebenaran ilmiah oleh sivitas akademika. Pengembangan kultur PT dalam pasal 9 (1) berlaku kebebasan akademik yakni bebas mendalami dan mengembangkan iptek secara bertanggung jawab melalui tridharma. Pasal 46 (2) hasil penelitian wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dan/atau dipatenkan. Di sisi lain, hasil riset bukan barang utama yang dijadikan pijakan pemerintah dalam menentukan kebijakan atau sebagai produk hukum.

Ada dua istilah, menurut peneliti di Pusat Penelitian LIPI Wasisto Raharjo Jati, yakni hasil kebijakan bersumber dari riset (*policy-based research*) atau hasil kajian berbasis riset (*evidence-based research*) yang keduanya belum dijadikan perhatian pemerintah. Implikasinya, kebijakannya dihasilkan dibuat berdasarkan nalar *by agenda* dan *by issue*, bukan *by research*. Kondisi itulah penyebab hasil riset tertumpuk di gudang kantor pemerintah. Dunia riset seharusnya menjadi arena strategis perumusan kebijakan pemerintah yang dibangun melalui *agenda setting* (Wasisto, 2015). Pernyataan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Anton Haryono bahwa cendekiawan dan akademisi seharusnya tak sekedar menjalankan kerja akademis di kampus, tapi juga aktif terlibat dalam penyelesaian berbagai persoalan masyarakat. Pada saat tertentu, cendekiawan dituntut memperjelas keberpihakannya terhadap kepentingan masyarakat yang kurang beruntung. Pembicara lain, sosiolog UI Francisia Ery Seda menyatakan, akademisi perlu mengembangkan kerja intelektual yang tak hanya bermanfaat bagi diri dan kampusnya, juga berkontribusi terhadap berbagai persoalan riil masyarakat dengan menjauhi praktik komodifikasi atau jual-beli pengetahuan agar tak memihak yang berkuasa dan pemilik modal. Tapi, memihak pada masyarakat yang kurang

beruntung dan tak bermodal (Kompas, 6 Maret 2015). Dengan demikian, ilmuwan dalam mempertahankan prinsip keilmuannya akan bermanfaat bagi publik, meski tidak lepas dari penghadangan dari penguasa. Konsekuensinya, pada taraf tertentu harus siap membela yang lemah atau dilemahkan.

Nasib Umat Agama Baha'i di Pati Jateng

Penulis tertarik menulis topik tentang agama Baha'i diawali pada 24 Juli 2014, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin (masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada jabatan periode kedua) menegaskan melalui akun twitternya bahwa ia tengah mengkaji agama Baha'i. Apakah bisa diterima sebagai agama baru di Indonesia atau tidak. Kajian ini dilakukan setelah Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengirimkan surat pada Menag yang mempertanyakan perihal Baha'i kaitannya dengan pelayanan kependudukan. Twit secara singkat: pemerintah Indonesia menambah daftar agama baru yang secara resmi diakui. Setelah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu, pemerintah menyatakan bahwa Baha'i merupakan agama yang keberadaannya diakui konstitusi. Diutarakan Menag Lukman Hakim Saifuddin melalui akun twitter @lukmansaifuddin pada 24 Juli 2014 pukul 19:55. Alasan pengakuan sebagai agama yang diakui pemerintah dalam 10 serial kultwit. Awalnya Mendagri bersurat pada Menag, apakah Baha'i benar merupakan salah satu agama yang dipeluk penduduk Indonesia? Pertanyaan berkaitan keperluan Kemendagri sebagai dasar pelayanan administrasi kependudukan. Selaku Menag menjawab: Baha'i merupakan agama dari sekian banyak agama yang berkembang di 20 negara. Baha'i suatu

agama, bukan aliran dalam agama. Pemeluknya tersebar di Banyuwangi 22, Jakarta 100, Medan 100, Surabaya 98, Palopo 80, Bandung 50, Malang 30 orang. Baha'i termasuk agama yang dilindungi konstitusi sesuai Pasal 28 E dan 29 UUD '45. Berdasar Penpres No.1/PNPS/1965 agama Baha'i selain enam agama mendapat jaminan dari negara dan dibiarkan adanya sepanjang tak melanggar perundangan. Menag berpendapat, umat Baha'i sebagai WNI berhak mendapat pelayanan kependudukan, hukum, dll dari pemerintah (Republika, 24 Juli 2014). Pada hari yang sama pukul 22:55 (selang beberapa menit) Menag mengklarifikasi kabar pengakuan Baha'i sebagai agama baru. Ia mempertanyakan kewajiban negara mengakui sebuah keyakinan sebagai agama atau bukan agama. Akun twitter Menag menegaskan, ia tak menyebut Baha'i sebagai agama baru. Tapi, Kemenag sedang mengkaji dan mendalami peran pemerintah. Konteks bernegara, apa pemerintah berhak mengakui atau tak mengakui suatu keyakinan itu agama atau bukan agama. Faktor lain yang perlu pendalaman perihal Baha'i, komunitas minoritas memiliki mutiara yang dapat dijadikan sumber inspirasi kehidupan. Anggapan sebagian publik terhadap agama Baha'i membuat kajian makin menarik, seperti ajaran Baha'i mendapat tuduhan sebagian publik mengombinasikan filsafat panteisme, ajaran hulul (dalam tasawuf), petikan dari Taurat, Tantrisme, paham Batiniyah, dsb. Tapi, penuduh tak memberi data riil, meskipun tanpa data berdampak dianggap sesat oleh Perdana Menteri RI dengan Surat Keputusan Nomor 122/P.M./1959 tanggal 21 Maret 1959. Padahal, SK Perdana Menteri RI tersebut ditujukan pada penghayat kepercayaan, sedangkan Baha'i bukan aliran kepercayaan tapi agama yang

mandiri. Kesalahan penafsiran tersebut menjadi iklan kalam bagi agama Baha'i. Untuk mendapatkan realitas data, riset ini dilakukan.

Mukmin Baha'i (sebutan bagi pemeluk agama Baha'i) tak dilayani hak sipilnya oleh aparat pemerintah setempat dengan dalih belum/tak diakui negara sebagai agama resmi. Meski demikian, tetap kokoh beragama Baha'i di tengah problem berupa tak diakui agama Baha'i oleh negara (meski tak mengakui bertentangan dengan amanat Penpres No.1/PNPS/1965). Bentuk riil tak diakui atau tak dipenuhinya permohonan penerbitan akta perkawinan warga Baha'i (kawin secara Baha'i), kolom agama dalam KTP diberi tanda setrip (-), sekolah formal tidak diberi pelajaran agama Baha'i, bahkan harus pindah agama lain (satu di antara agama mayoritas), pemakamannya disendirikan dengan pemakaman umum.

Diskriminasi itu imbas tak memahaminya aparaturnya negara di aras terbawah (seperti dinas kependudukan dan catatan sipil, dinas pendidikan dan kebudayaan, dan camat) bahwa pemerintah tak membatasi jumlah agama, sehingga agama Baha'i pun sah hidup di Indonesia manakala ajarannya tak bertentangan dengan perundangan.

Organisasi Baha'i dalam perjalanannya di Indonesia dilarang berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 264 Tahun 1962 tentang Larangan Adanya Organisasi Liga Demokrasi, Rotary Club, Divine Life Society, Vrijmetselaren-Loge (Loge Agung Indonesia), Moral Rearmament Movement, Ancient Mystical Organization Of Rosi Crucians (AMORC) dan Organisasi Baha'i. Presiden Gus Dur mencabut dengan Kepres Nomor 69 Tahun 2000 tanggal 23 Mei 2000 tentang Pencabutan Kepres Nomor 264 Tahun 1962 tentang Larangan Adanya Organisasi Liga Demokrasi,

Rotary Club, Divine Life Society, Vrijmetselaren-Loge (Loge Agung Indonesia), Moral Rearmament Movement, Ancient Mystical Organization of Rosi Crucians (AMORC) dan Organisasi Baha'i. Pertimbangan pencabutan Gus Dur atas Kepres Nomor 264 dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan prinsip demokrasi; meskipun dalam kenyataannya Keputusan Presiden Nomor 264 Tahun 1962 sudah tidak efektif lagi, namun untuk lebih memberikan kepastian hukum perlu secara tegas mencabut Kepres Nomor 264 Tahun 1962. Angin segar bagi mukmin Baha'i era Gus Dur semasa menjabat Presiden RI menerbitkan Kepres No.69/2000 mencabut larangan 7 organisasi termasuk Baha'i yang pernah dikeluarkan Presiden Soekarno dalam Kepres Nomor 264 Tahun 1962. Kepres Gus Dur belum berdampak positif secara luas bagi umat Baha'i, khususnya di Desa Cebilek Kidul, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, Jateng. Jumlahnya hanya 10 KK, 27 jiwa dari 3.500 jumlah penduduk desa (Rosyid, 2015).

Nasib Agama Baha'i Pasca Kepres Gus Dur

Hal yang menyebabkan Kepres Gus Dur tak berjalan optimal diakibatkan oleh, Pertama, pemahaman penyelenggara pemerintah dari level atas (pemerintah pusat) hingga pemda (terbawah) terhadap perundangan yang tidak optimal. Sebagaimana pemahaman Penpres Nomor 1/PNPS/1965 Pasal 1 ayat (1) bahwa negara tak membatasi jumlah agama. Semua agama berhak hidup di Indonesia. Asalkan, tidak bertentangan dengan perundang-undangan. Kedua, poin pertama tersebut akibat tidak dipelajari muatan perundangannya, hanya berdasarkan mewarisi pemahaman secara turun-temurun atas dasar 'mendengar'. Di sisi

lain, pejabat di lingkungan pemda mempertahankan pemahaman tersebut tanpa upaya pendalaman sehingga muatan perundangan tak memiliki makna.

Kedua hal itu sebagai penanda bahwa perlu kepedulian akademisi untuk memberikan pencerahan pada publik, khususnya pada penyelenggara negara melalui hasil riset dan lainnya agar pemerintah melayani, menghormati, dan memenuhi hak umat beragama, apa pun agamanya, terutama minoritas yang rentan diperlakukan tidak bijak oleh mayoritas.

PENUTUP

Terlayannya hak sipil warga negara, apa pun agamanya, merupakan kewajiban pemerintah. Akan tetapi, hal tersebut tak terwujud bila pemimpin (sebagai atasan) tak menegakkan perundangan dengan tegas. Imbas yang diderita umat Baha'i adalah hak sipilnya tak dilayani, seperti tak dipenuhinya permohonan penerbitan akta perkawinan warga Baha'i yang kawin secara Baha'i, kolom agama dalam KTP diberi tanda setrip (-), sekolah formal tidak diberi pelajaran agama Baha'i bahkan harus pindah agama lain (satu di antara agama mayoritas), dan pemakamannya disendirikan dengan pemakaman umum. Hal ini merupakan imbas (berdasarkan pemahaman pemerintah) kesalahan pemahaman bahwa agama Baha'i adalah agama tak resmi. Padahal, negeri ini bukan negara agama, bukan pula negara sekuler, tapi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang memfasilitasi agama bagi warganya, apa pun agamanya. Sehingga pemerintah pun tak pernah meresmikan sebuah agama satu pun, tapi berhak hidup dan dijamin kehidupan warganya yang beragama.

DAFTAR PUSTAKA

- Haryanto, Ignatius. Ketakutan akan Kiri. Kompas, 5 Maret 2016.
- Jamil, M.Mukhsin. Agama-Agama Baru di Indonesia. Pustaka Pelajar: Yogyakarta. 2008.
- Jati, Wasisto Raharjo. Jokowi dan Dunia Riset Indonesia. Kompas, 24 Oktober 2015.
- Rosyid, Moh. Toleran dalam Berderma. Koran Muria, 2 Januari 2015.
- Agama Baha'i dalam Lintasan Sejarah di Jawa Tengah. Pustaka Pelajar: Yogyakarta. 2015.
- Prasojo, Eko. Revolusi Mental Birokrasi. Kompas, 27 Oktober 2015.
- Sasmita, Ira. Baha'i Faith: Keesaan Tuhan, Kesatuan Agama dan Kesatuan Umat Manusia. Newsletter Institute for Interfaith Dialogue in Indonesia (Interfidei): Yogyakarta, 2010.
- Takwin, Bagus. Deteksi Ketimpangan dengan Barometer Sosial, Kompas, 10 Agustus 2015.